

**PEMIKIRAN HUKUM BISNIS SYARIAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA
(STUDI ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
MENGENAI PERSEROAN TERBATAS)**



Oleh :
M. Arif Al Kausari, S.H.I.
NIM: 1520310009

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

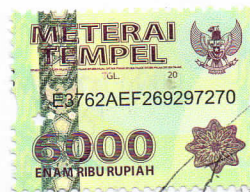
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Arif Al-Kausari, S.H.I.
NIM : 1520310009
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



M. Arif Al-Kausari, S.H.I
NIM: 1520310009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Arif Al Kausari, S.H.I.
NIM : 1520310009
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



M. Arif Al-Kausari, S.H.I
NIM: 1520310009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-836 /UIN.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PEMIKIRAN HUKUM BISNIS SYARIAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (STUDI ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA MENGENAI PERSEROAN TERBATAS)".

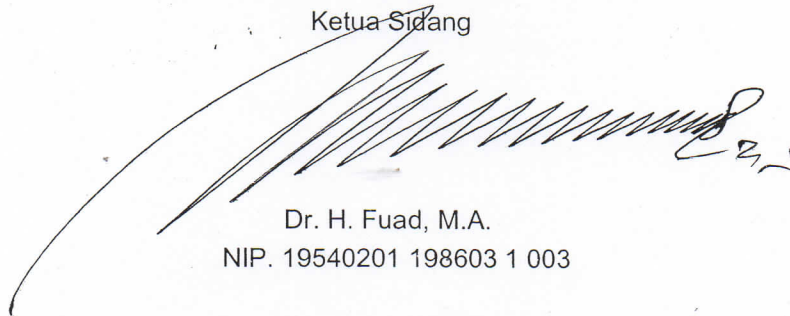
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ARIF AL KAUSARI, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310009
Telah diujikan pada : Senin, 27 Maret 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. H. Fuad, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

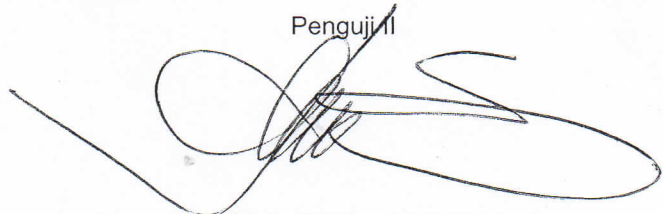
Penguji I



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 6 April 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMIKIRAN HUKUM BISNIS SYARIAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA
(STUDI ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
MENGENAI PERSEROAN TERBATAS)**

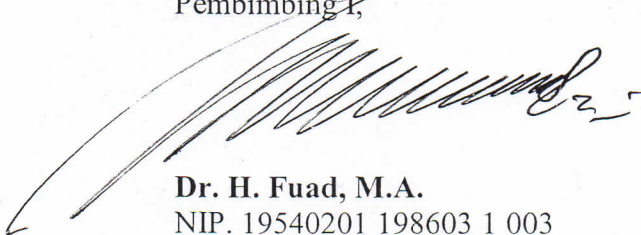
Yang ditulis oleh:

Nama : M. Arif Al-Kausari, S.H.I
NIM : 1520310009
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2017
Pembimbing I,



Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PEMIKIRAN HUKUM BISNIS SYARIAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (STUDI ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA MENGENAI PERSEROAN TERBATAS)

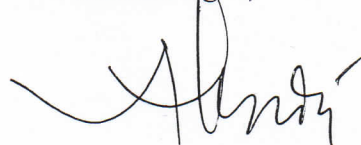
Yang ditulis oleh:

Nama : M. Arif Al-Kausari, S.H.I
NIM : 1520310009
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2017
Pembimbing II,



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang cukup signifikan. Kesadaran masyarakat muslim akan ekonomi Islam ini ditunjukkan dengan lahirnya berbagai lembaga-lembaga keuangan dengan sistem syariah. Selama ini, lembaga-lembaga keuangan yang ada hanya sebatas mengkonversi sistem operasionalnya. Sebut saja, misalnya lembaga keuangan yang dahulunya dengan sistem bunga (*interest*) mengkonversi sistemnya menjadi *mudharabah*, *murabahah*, *istiṣna*, *ijârah* dan lain sebagainya, atau dengan kata lain dari lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syari'ah. Namun disatu sisi secara bentuk kelembagaan perusahaan tidak berubah, yaitu berupa perseroan. Sementara Hizbut Tahrir Indonesia beranggapan bahwa suatu bisnis yang dikembangkan melalui perseroan tidaklah sah, karena sejak awal perseroan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syirkah dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber data utama yang dijadikan rujukan untuk memahami dan menilai pandangan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai Perseroan Terbatas adalah karya Taqiyuddin an-Nabhani *an-nizâm al-iqtisâdi fi al-Islâm*. Buku ini merupakan buku *mutabannat* di kalangan Hizbut Tahrir Indonesia. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis ushul fiqh, artinya penelitian ini mengkaji argumentasi mengapa Hizbut Tahrir Indonesia menganggap perseroan terbatas adalah bentuk akad yang batil, dan selanjutnya akan dinilai argumentasi-argumentasi tersebut, dari sisi pemahaman esensi perseroan terbatas dan metode *istinbât* hukumnya.

Ketidaksahan perseroan dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia, disebabkan oleh tiga hal, yaitu : aspek akad yang tak terbentuk, status perseroan sebagai badan hukum, dan tidak adanya unsur badan dalam perseroan. Selanjutnya dalam merumuskan pandangan ini, Hizbut Tahrir Indonesia mula-mula menjelaskan secara garis besar dua jenis persekutuan bisnis, yaitu persekutuan bisnis yang sesuai dengan Islam dan persekutuan bisnis produk kapitalis (*ar-ra'sumaliyah*). Persekutuan bisnis yang Islami dikemukakan jenis-jenis *syirkah* yang telah dirumuskan oleh fuqaha klasik, dan menurut Hizbut Tahrir semua jenis *syirkah* dibolehkan. Meskipun demikian, tidak dilakukan tarjih antar satu pendapat yang berbeda di kalangan para fuqaha. Selanjutnya, perseroan terbatas sendiri dimasukkan kedalam jenis persekutuan bisnis produk kapitalis.

Kekeliruan Hizbut Tahrir Indonesia dalam memandang status hukum Perseroan terletak pada kekakuannya dalam memahami bentuk *ṣigat* akad syirkah yang dilakukan oleh para pendiri perseroan. Di samping itu penerapan konsepsi fiqh mengenai syirkah untuk perseroan terlalu formalistik, menjadikannya tidak mentolerir bentuk perseroan. Hal ini tak lepas dari pandangan mereka mengenai *maqâṣid syari'ah*, yaitu syariat Allah diterapkan bukan karena adanya suatu kemaslahatan, dengan kata lain *maqâṣid syari'ah* itu bukanlah *illat* untuk berhukum, namun dengan menjalankan syari'at Allah tersebut akan mendatangkan rahmat atau keselamatan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta'qqidin 'iddah
----------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

UNTUK YANG TELAH TERUS DAN TANPA HENTI SELALU MEMBEKALIKU DENGAN TUMPAHAN KERINGAT, DOA DAN HARAPAN SERTA CINTA DAN KASIH SAYANG YANG PENUH IKHLAS DAN PENUH MAKNA, KU PERSEMBAHKAN KARYA INI SEBAGAI UNGKAPAN CINTA, KEPADA;

- ✚ AYAHANDA H.M. HAKKI DAN IBUNDAKU HJ. FAUZIAH YANG TIDAK PERNAH LELAH MENJAGA MEMBERIKAN KEIKHLASAN KASIH SAYANG DAN DOA.
- ✚ UNTUK SEMANGAT HIDUPKU, KAKAK DAN ADIK KU, SERTA SEMUA KEPONAKAN KU YANG SELALU MENYEMANGATIKU AGAR SELALU SEMANGAT, SENANTIASA SEHAT SELALU DAN SELALU MERINDUKANKU.
- ✚ SAUDARA-SAUDARAKU YANG SELALU MENGHARAPKAN AKU AGAR KELAK, AKU MENJADI ORANG YANG BERGUNA BAGI BANYAK ORANG.
- ✚ PADA AL-MAMATER TERCINTA PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA.

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل الطاعات، ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات، وهدانا إلى قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات، وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب الآيات.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Qadi Rabbul Jalīl, yang dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya tesis ini bisa terselesaikan sebagaimana yang diinginkan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat junjungan alam, pigur central, panutan umat sepanjang masa, nabi Muhammad saw. karena berkat kegigihan Beliau, sampai saat ini panji Islam masih berkibar di alam jagat raya ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan begitu tinggi kepada :

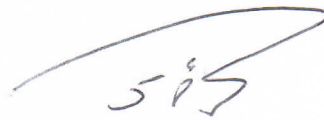
1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Kajur Program Studi Magister Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Fuad, M.A. dan Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku pembimbing I Dan II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dengan penuh kesabaran sampai tesis ini bisa terselesaikan.

5. Segenap Dosen Prodi Syari'ah Dan Hukum konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Begitu juga kepada seluruh karyawan dan petugas Perpustakaan Pusat dan perpustakaan Pascasarjana UIN Suka. Keramahan dan profesionalisme dalam melayani kami menjadi ladang amal di sisi Allah swt.
6. Tak terlupakan, terimakasihku buat Ayahanda & Ibunda, yang tercinta H. M. Hakki dan Hj. Fauziah semoga selalu diberikan kesehatan, iman dan Islam yang kuat untuk bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik dan diridhai Allah Swt, yang telah berjuang mencari rizki untuk keluarga tercinta. Tanpa mengenal lelah, Do'a tulus, semangat, senyum, canda, tangis, kerja keras untuk membiayai kuliah saya semoga menjadi amal ibadah *jāriyah* kalian dan pelajaran berharga bagi saya sebagai anak. Semoga Allah membalasnya dengan janji-Nya yang Maha Benar.
7. Begitu juga kakak dan Adik ku atas bantuan dan dukungannya, baik secara moriil terlebih secara materiil bagi peneliti, sehingga studi dan penelitian ini dapat terselesaikan. Kalian yang selalu memberikan yang terbaik untukku, terimakasih buat kakak dan abang tercinta.
8. Teman-teman keluarga HBS, kebersamaan, semangat, canda tawa, motivasi dan inspirasi kalian sangat berharga untuk menjadi kenangan dan referensi ke depan, semoga kita semua diberikan kemudahan, kesuksesan dan keberkahan dalam segala urusan. Amiin
9. Terakhir buat teman-teman seperjuangan satu daerah yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa NTB, demikian juga buat teman-teman Himmah NW, Majelis Hizib NW yang berkenan meluangkan waktu untuk kita bersama-sama berdiskusi dan mengembangkan cakrawala berfikir kita. Buat teman-teman *mahalla* Sopen yang mengenalkan saya tentang bagaimana manisnya iman dan meneguhkan cita-cita saya tentang maksud dan tujuan hidup.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis yang ada di hadapan pembaca ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena bagaimanapun kesalahan dan keteledoran kerap menghampiri setiap insani termasuk penulis sendiri. Oleh sebab itu, saran

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 6 Maret 2017
Penulis.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by the letters 'A' and 'K'.

M. Arif Al-Kausari, S.H.I.
NIM. 1520310009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	viii
HALAMAN TRANSILTRASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoretik.....	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	26

BAB II

PERSEROAN TERBATAS DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG

DAN SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM	26
A. Pengertian dan Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia.....	27
B. Nama Perseroan Terbatas	37
C. Proses Pembentukan atau Pendirian PT.....	40
D. Modal dan Saham Perseroan Terbatas	44
E. Organ Perseroan Terbatas	48
F. Syirkah dalam Fikih	57

BAB III

PERGERAKAN HIZBUT TAHRIR DAN PEMIKIRANNYA

TENTANG PERSEROAN TERBATAS	77
A. Definisi dan Latar Belakang Hizbut Tahrir.....	77
B. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir	78
C. Perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia	83
D. Tabanni Sebagai Prinsip Pergerakan	87
E. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Mengenai Perseroan Terbatas	97

BAB IV

TELAAH PANDANGAN HIZBUT TAHRIR TENTANG

PERSEROAN TERBATAS	130
A. Telaah Pandangan HTI tentang Ketidaksahan Perseroan Terbatas	131

B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Hizbut Tahrir Indonesia dalam Memutuskan Status Hukum Perseroan Terbatas	142
BAB V	
PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran-saran	156
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	162

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biografi Tokoh
Lampiran 2	Daftar Terjemah Teks Arab
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pergerakan ekonomi Islam secara formal di Indonesia dimulai sejak tahun 1911 dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam yang dimotori oleh para pengusaha dan tokoh muslim. Bahkan jauh sebelum itu para santri dan umat Islam memiliki peranan yang besar dalam dunia perdagangan. Clifford Geertz seorang antropolog Amerika (1955) dalam buku *pedlars and princes* menyatakan bahwa para santri reformis yang berprofesi sebagai pedagang atau wirausahawan memiliki etos *entrepreneurship* yang tinggi. Sementara dalam buku “*The Religion of Java*” sebagaimana dikutip oleh Ahyar Ari Gayo menyatakan, pengusaha santri (muslim) adalah mereka yang dipengaruhi oleh semangat kerja Islam yang hidup di lingkungan mereka bekerja.¹

Pada dwidasawarsa terakhir, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ekonomi syariah terus meningkat. Disamping karena ekonomi konvensional yang tidak memenuhi harapan, juga karena kesadaran umat Islam sendiri yang ingin menjalankan syariah secara *kaffah* (menyeluruh) kian meningkat. Momentum ini ditandai dengan lahirnya beberapa lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah dan maraknya bisnis-bisnis yang menawarkan konsep berbasis syariah. Antusiasme ini dibuktikan dengan meningkatnya Dana Pihak Ketiga yang dititipkan di Bank-bank Syariah yang ada di Indonesia pada Desember tahun 2014

¹ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Mendorong Perkembangan Perbankan Syariah* dalam jurnal *Rechtvinding*, Vo. 1 No. 2, 2012, hlm. 258.

sebesar 217,858 triliun dibandingkan pada Desember 2013 yang berjumlah 183,534 triliun. Demikian juga jumlah pembiayaan yang disalurkan pada per Desember 2014 mencapai 199,330 triliun yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan keadaan pada sebelumnya yang berjumlah 184,122 triliun.²

Lahir dan berkembangnya kegiatan bisnis syariah tersebut tak lepas dari basis konseptual yang menjadi pijakannya yaitu fatwa-fatwa tentang pengembangan produk suatu pembiayaan di perbankan syariah atau suatu jenis praktik bisnis tertentu, sehingga dengan lahirnya fatwa tersebut dapat memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi konsumen muslim.

Fatwa yang merupakan hasil dari proses berijtihad dapat dilakukan oleh ulama secara individual bahkan secara kolektif dengan epistemologi yang mereka miliki. Ijtihad dari seorang ulama pada akhirnya akan menghasilkan sebuah fatwa. Fatwa sebagai legal opinion tidak bersifat mengikat, tetapi hanya menjadi informasi hukum untuk kebutuhan sendiri. Pada masa lalu, legal opinion yang tidak mengikat itu dilakukan oleh individu. Kini karena kelangkaan mufti yang berkualitas, pekerjaan ini diambil alih oleh lembaga yang beranggotakan banyak orang yang ahli dalam hukum Islam.³ Keadaan demikian tak terkecuali Indonesia.

Hingga awal abad dua puluh, perumusan fatwa hanya dilakukan oleh ulama secara perorangan. Namun pada kuartal kedua abad dua puluh, beberapa telah mulai dilakukan oleh ulama secara kolektif melalui sebuah lembaga yang dalam hal ini, demi merespon problem-problem dari masyarakat Indonesia yang

² <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>. Diakses 13 Desember 2016.

³ Maskun, *Problematika Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, *Mimbar Hukum* No. 49, (Jakarta : al-Hikmah, 2000), hlm. 41.

majemuk, mayoritas 90 persen beragama Islam. Ikhtiyar untuk merespon problem masyarakat telah dilakukan oleh ulama secara kolektif di beberapa lembaga fatwa di bawah naungan ormas-ormas Islam seperti : Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il NU, Dewan Hisbah Persis dan Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera. Sedangkan lembaga yang menghimpun sekian jumlah ormas Islam tersebut yaitu Majelis Ulama Indonesia yang dalam struktur kepengurusannya memiliki komisi Fatwa.⁴

Di luar lembaga fatwa tersebut ada beberapa ulama yang *faqih* melakukan ijtihad secara individual baik berupa fatwa atau gagasan dalam bentuk *shaqafah* Islam yang dituangkan dalam beberapa karya ilmiah. Di antaranya : A. Hassan (Persis)⁵, Hazairin dengan gagasan mazhab Indonesia dan Hasbi Ash-Shiddiqie dengan gagasan fikih Indonesia.⁶ Tokoh-tokoh lainnya yang tak boleh dilupakan adalah M. Quraish Shihab sebagai pakar tafsir al-Qur'an menulis buku "1001 soal keislaman yang patut diketahui", Selanjutnya Ali Yafii menulis buku "*Menggagas Fikih Sosial*" dan Sahal Mahfudh dengan bukunya *Nuansa Fiqih Sosial*. Kehadiran dua buku fikih sosial yang dirilis pada akhir dekade rezim orde baru ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pengembangan hukum Islam

⁴ Ketua Komisi Fatwa saat ini (hasil Munas MUI Tahun 2015), yaitu Prof. Dr. H. Hasanuddin AF. <http://mui.or.id/tentang-mui/pengurus-mui/periode-berjalan/pengurus-hasil-munas-2015.html>

⁵ A. Hassan (1887-1958) salah satu tokoh penting sebagai pembaharu dalam dunia pemikiran hukum Islam di Indonesia. Buku yang mengkaji pembaharuan pemikirannya yaitu berjudul "Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia". Tulisan Akh. Minhaji, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta Press, 2001).

⁶ Yudian Wahyudi, *Hasbi's Theory of Ijtihad :in The context of Indonesian Fiqh*, (Yogyakarta : Nawasea Press, 2007).

dengan semangat dan nuansa keindonesiaan dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan.⁷

Sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, semua orang bisa berbicara tentang apa saja dengan bebas, termasuk mengemukakan ide-ide atau pendapat yang berkaitan dengan Islam ; sesuatu yang dilarang pada zaman orde baru seperti formalisasi syariat Islam, Piagam Jakarta, Perda bernuansa Syariah, bahkan keinginan untuk mendirikan kembali Partai dan Ormas berasaskan Islam. Di era ini kita menjumpai beberapa gerakan Islam selain, NU, Muhammadiyah dan Persis yang berkembang begitu pesat, sebut saja misalnya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Salafi, Laskar Jihad dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).⁸

Gerakan-gerakan tersebut muncul secara fenomenal dan kontroversial. Dikatakan fenomenal karena dalam waktu singkat dapat merekrut banyak anggota dan memberikan simpati kepada masyarakat muslim Indonesia. Sementara gerakan ini juga begitu kontroversial, karena di antara gerakan-gerakan tersebut ada yang melakukan tindakan-tindakan *sweeping*, penggerebekan diskotik hingga membubarkan secara paksa aliran-aliran keagamaan yang dianggap menyimpang.

Berbeda halnya dengan HTI yang justru selama ini dikenal tidak pernah menimbulkan keresahan, meskipun demikian ia mampu fenomenal dengan gagasan politik *eskra* parlementernya. Jika ditelusuri sejarahnya, HTI bukan barang baru. Ia masuk ke Indonesia pada 1982-1983. Walaupun selama ini

⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2000), hlm. 53.

⁸ Fadh Ahmad Arifan, “Pandangan Aktivis HTI di Malangtentang Metode Ijtihad HTI dalam Bidang Politik dan Ibadah”, *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2011, hlm. 178.

masyarakat hanya mengenal gerakan HTI dari pengajian, media massa, isu-isu yang beredar baik di Internet maupun di kegiatan-kegiatan diskusi. Selebihnya pokok-pokok pikiran mereka dapat dengan mudah kita ketahui melalui peredaran buletin dakwah *al-Islam* setiap hari jum'at. HTI memang fenomenal untuk urusan politik, tercatat sudah dua kali mereka menggelar konferensi Khilafah Islamiyah pada tahun 2000 dan tahun 2007. Dalam kesehariannya aktivis HTI menonjol aktivitas politiknya sebagaimana lazim ditemui antara lain : pawai damai (*maṣīrah*), diskusi panel di berbagai kampus, Tabligh Akbar, Manifesto HTI, kampanye penegakan syariat Islam dengan metode khilafah, anti berkoalisi dengan kelompok sekuler, dan golput ketika pemilu.⁹

Dari aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia yang lebih menonjol dalam bidang politik tersebut, maka tak heran jika berbagai kajian, tulisan dan penelitian yang ada baik dari kalangan orang di luar mereka (*outsider*) atau pihak di dalam sendiri (*insider*) juga didominasi mengenai pemikiran dan gerakan politik mereka, baik yang bersifat global ataupun penelitian yang cakupannya regional.¹⁰ Kecenderungan aktivitas mereka yang berkaitan dengan politik, tak lepas dari pandangan mendasar mereka mengenai apa itu politik. Bagi mereka politik adalah

⁹ Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah*, (Bandung : Harakatuna Publishing, 2005), hlm. 58.

¹⁰ Nafis Irkhami membagi kajian mengenai HTI menjadi dua, yaitu *pertama* tentang pergerakan organisasinya dan *kedua* tentang pemikiran-pemikiran atau ideologinya. Penelitian pertama lebih didominasi oleh kalangan *outsider* yang mengungkapkan dinamika gerakan, pola gerakan, pola rekrutmen organisasi, *tipologi* pengikut organisasi, dan inklusifitas dan eksklusifitas HT. Sedangkan tipe penelitian kedua lebih banyak dari kalangan insider yang mengungkap gagasan HT mengenai konsep *khilafah*. Nafis Irkhami, *Pemikiran Keuangan Publik Hizbut Tahrir Indonesia*, Tidak diterbitkan Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 14.

mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahannya.¹¹

Namun kalau diamati ada sisi lain yang belum banyak disentuh oleh para peneliti lainnya, yaitu mengenai pemikiran hukum bisnis syariah Hizbut Tahrir.¹² Padahal HTI sendiri cukup agresif dalam merespon isu-isu bisnis syariah kontemporer. Mereka boleh dikatakan lebih produktif menelaah, mengkaji dan menulis berbagai praktik-praktik bisnis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan tinjauan syariah perspektif mereka baik melalui buku yang ditulis oleh amir mereka, melalui website resmi, melalui corong majalah, atau buku-buku yang ditulis oleh pengurus Hizbut Tahrir Indonesia. Bahkan boleh dikatakan lebih aktif dari ormas-ormas Islam lainnya selain dari MUI yang memiliki lembaga tersendiri dalam mengeluarkan fatwa hukum ekonomi syariah. Sikap ini tak lepas dari cita-cita Hizbut Tahrir yang ingin menerapkan hukum Islam pada semua lini kehidupan, baik dalam bidang politik, budaya, kemasyarakatan, maupun ekonomi dan lain-lain.¹³

Kesungguhan cita-cita Hizbut Tahrir untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan hukum Islam salah satunya diwujudkan dalam pandangannya

¹¹ Lihat Hizbut Tahri, *Struktur Negara Khilafah : Pemerintahan dan Administrsi* (Jakarta : HTI Press, 2008), dalam Fadh Ahmad Arifan, "Pandangan Aktivis HTI di Malang tentang Metode Ijtihad HTI dalam Bidang Politik dan Ibadah", *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2011, hlm. 178.

¹² Istilah hukum bisnis syariah yang dimaksud disini adalah segala peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan ketentuan syar'ah. Ruang lingkup hukum bisnis syariah sendiri sesungguhnya cukup luas, yaitu berkaitan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang, fatwa DSN atau doktrin fikih. Namun dalam tulisan ini istilah tersebut lebih menunjukkan pada tema-tema tertentu yang menjadi produk pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia dalam bidang bisnis syariah.

¹³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafâhîm Hizbut Tahrir*, ke-6, (ttp. : t.p., 2001), hlm. 81.

terhadap praktik bisnis. An-Nabhani (1909-1977)¹⁴ merumuskan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh para pelaku bisnis. Dalam buku *an-Nizâm al-Iqtisâdi fî al-Islâm* ia memaparkan tentang prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam melakukan bisnis antara lain ; Tidak boleh mengandung perjudian (*qimâr*), riba, penipuan (*al-ghabn*), menyembunyian informasi dalam jual beli (*tadlîs*) dan penimbunan (*ihdikâr*).¹⁵ Prinsip dasar yang diletakkan oleh an-Nabhani kemudian oleh beberapa pengikutnya di Indonesia dijadikan sebagai panduan dalam melihat berbagai praktik bisnis yang berkembang dewasa ini.

Kekhasan HTI dalam merespon praktik bisnis yang berkembang di masyarakat, terbilang unik. Karena idealisme dan independensinya dalam memberikan pandangan hukum Islam dalam bidang hukum bisnis. Sehingga tak sedikit dari pandangan mereka yang tidak sependapat dengan DSN-MUI yang sesungguhnya memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa serta diakui oleh pemerintah sebagai mitra dalam merumuskan regulasi praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah dan perbankan syariah khususnya. Dalam Pasal 26 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan :¹⁶

Pasal 26

- (1) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.

¹⁴ Nama lengkapnya adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, lahir di palestina kampung Ajzam pada tahun 1909. Ia merupakan pendiri sekaligus amir pertama gerakan Hizbut Tahrir.

¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nizâm al-Iqtisâdi fî al- Islâm* (Beirut : Dar al-Ummah, 2004), hlm. 178.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Pdf). Selain itu terdapat beberapa regulasi lainnya yang menunjukkan MUI (DSN-MUI) diakui sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan prinsip syariah serta memiliki tugas pengawasan, antara lain : Pasal 109 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 25 UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 2 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 31 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/1999.

- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Meskipun demikian HTI tak begitu saja menerima pandangan DSN-MUI tersebut sebagai acuan mereka dalam menjalankan praktik bisnis. Bahkan salah seorang tokoh mereka Hafidz Abdurrahman mengkritik beberapa produk pemikiran DSN-MUI melalui bukunya yang berjudul “Menggugat Bank Syariah : Kritik atas Fatwa Produk Bank Syariah”.¹⁷ Selain itu penulis yang sama menulis buku mengenai bisnis dan muamalah kontemporer yang memuat tentang praktik-praktik bisnis kekinian ditinjau dari perspektif syariah.¹⁸

Salah satu bentuk praktik bisnis yang menjadi sorotan Hizbut Tahrir Indonesia yaitu tentang perseroan. Dalam pandangan mereka bahwa perseroan yang ada saat ini merupakan produk dari perseroan sistem kapitalis, yang mana transaksi di dalamnya batil sehingga haram bergabung dalam perseroan tersebut.¹⁹ Mereka beranggapan bahwa Perseroan tersebut terbentuk hanya didasarkan pada persero modal semata, tanpa ada persero badan. Padahal dalam hukum Islam perseroan itu (*syirkah*) dapat terwujud ketika ada persero badan, karena persero badanlah yang dapat melakukan kegiatan bisnis (*taṣarruf*). Adapun dewan direksi yang mengelola suatu kegiatan bisnis menurut mereka adalah wakil dari persero

¹⁷ Buku *Menggugat Bank Syariah : Kritik atas Fatwa Produk Bank Syariah* ini memuat kritikan atas fatwa-fatwa MUI tentang perbankan syariah, mulai dari Giro Syariah, Deposito Syariah, Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah Qard, Pembiayaan Multijasa, Letter Credit Syariah, Garansi Syariah, dan Penukaran Valuta Asing. Hafidz Abdurrahman, *Menggugat Bank Syariah : Kritik atas Fatwa Produk Bank Syariah*, (Bogor : Al-Azhar Press, 2012).

¹⁸ Buku ini memuat empat belas bahasan mengenai praktik-praktik bisnis kontemporer dalam tinjauan hukum Islam. Tidak sedikit dari bahasannya yang bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI. Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor : Al-Azhar Fresh Zone, 2014).

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nizâm al-Iqtisâdi fi al-Islâm* hlm.169.

yang berupa modal. Sedangkan suatu persero baik dia berupa badan ataupun modal tidak dapat diwakilkan kepada pihak yang lain. Sebab akad perseroan tersebut mengikat dirinya sehingga dialah yang harus mengelolanya sendiri.²⁰

Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia sendiri berlaku sejak diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dan sampai saat ini telah mengalami penggantian undang-undang sebanyak tiga kali, yaitu UU No. 20 Tahun 1974, kemudian diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995 dan terakhir UU No. 40 Tahun 2007. Jika diamati, perubahan-perubahan tersebut didasarkan pada adanya tuntutan penyelerasan dengan pertumbuhan ekonomi global, kemajuan IPTEK, perusahaan berorientasi lingkungan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, Hizbut Tahrir Indonesia masih merujuk pada argumentasi-argumentasi yang terdapat dalam kitab *an-nizâm al-iqtisâdi fî al-Islâm*²¹ sebagai rujukan untuk menganggap bahwa PT yang ada saat ini tidak sah, kendatipun buku tersebut ditulis puluhan tahun yang lalu. Menurut Yahya Abdurrahman alasan ini setidaknya didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik PT yang ada saat ini dengan apa yang dikritisi oleh an-Nabhani masih relevan, diantara ciri-ciri tersebut antara lain :²²

1. Merupakan persekutuan modal.
2. Merupakan tindakan berdasarkan kehendak sepihak (*irâdah munfaridah*). Seseorang bisa menjadi pemilik saham semata-mata bergantung pada kehendaknya sendiri secara sepihak, dan tidak bergantung pada persetujuan atau kerelaan pesero lainnya.

²⁰ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, hlm. 255.

²¹ Kitab *an-nizâ al-iqtisâdi fî al-Islâm* merupakan kitab *al-mutabannat* dikalangan HTI, namun tidak penulis temukan waktu yang pasti kapan buku tersebut ditulis oleh an-Nabhani. Akan tetapi jika merujuk pada berdirinya HTI yaitu tahun 1953 sampai dengan meninggalnya an-Nabhani tahun 1977, maka tentu buku tersebut ditulis antara tahun tersebut.

²² <http://hizbut-tahrir.or.id>. Diakses tanggal 30 Maret 2017.

3. Sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal entity, juristic person*, atau *artificial person/syakhshiyah ma'nawiyah*) yaitu subyek hukum artificial, berupa badan atau perkumpulan, yang diperlakukan sebagai subyek hukum yang mandiri disamakan dengan orang perorangan, memiliki hak dan kewajiban, bisa memiliki harta sendiri, bisa digugat dan menggugat di depan pengadilan.
4. Sebagai badan hukum, PT memiliki harta sendiri atas namanya sendiri, terpisah dari harta para pemegang saham.
5. Setiap saat pemegang saham bisa memindahkan kepemilikan sahamnya, misal dengan menjualnya, kepada pihak lain.
6. Eksistensi PT tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak dihubungkan dengan eksistensi peseronya. PT tidak bubar meski pemilik saham meninggal, gila, atau dihijir, dsb.
7. Pertanggungjawaban pemilik saham terbatas, yaitu sebatas saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka itu tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

Di satu sisi keberadaan perseroan dalam bentuknya hari ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Karena terkadang ada seseorang yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola hartanya, maka dia membutuhkan pihak lain yang memiliki keahlian untuk selanjutnya berkongsi mendirikan satu usaha tertentu, atau ada seseorang yang memiliki modal yang terbatas, namun memiliki peluang untuk mendirikan suatu bisnis yang sesungguhnya tidak mampu terpenuhi oleh keterbatasan modalnya tersebut, sehingga ia harus menggabungkan modal dengan orang lain yang juga memiliki modal. Akhirnya terhimpunlah kumpulan-kumpulan modal yang dapat membiayai suatu bisnis tersebut. Atas dasar itu penelitian mengenai Pemikiran mengenai perseroan dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia, perlu untuk dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan masalah

Dari persoalan yang diketengahkan pada latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalahnya menjadi dua, yaitu :

1. Mengapa bentuk Perseroan Terbatas yang ada saat ini tidak sah menurut Hizbut Tahrir Indonesia ?
2. Bagaimana metode pengambilan hukum (*istinbat hukum*) Hizbut Tahrir Indonesia dalam memberikan pandangan terhadap bentuk Perseroan Terbatas ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini mencakup tiga hal,

1. Untuk menilai pandangan Hizbut Tahrir Indonesia tentang perseroan
2. Untuk menilai metode pengambilan hukum yang digunakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam memahami bentuk perseroan yang ada saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum bisnis syariah tentang metodologi (*istinbath hukum*) dalam merespon perkembangan praktik bisnis kontemporer khususnya mengenai Perseroan Terbatas baik dilakukan secara kolektif (*jama'i*) atau secara individual (*fardi*). Dengan mengetahui serta menganalisis secara mendalam konsepsi dan pemikiran HTI tentang Perseroan moderen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim tentang bagaimana semestinya implementasi perseroan yang benar menurut Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Secara praktis, dengan diketahuinya metodologi pengambilan hukum terhadap bentuk Perkongsian atau perseroan moderen dan bagaimana

seharusnya perseroan yang sesuai dengan HTI, maka penelitian ini dapat memberikan masukan kepada HTI khususnya tentang beberapa kelemahan metodologi mereka dalam merumuskan suatu pemikiran hukum bisnis syariah umumnya dan mengenai perseroan khususnya, serta diharapkan mampu memberikan manfaat bagi khalayak dan masyarakat pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia selama ini lebih banyak didominasi oleh kajian pemikiran politik mereka yaitu sistem *khilâfah*. Adapun kajian atau penelitian mengenai pemikiran hukum Islam atau pemikiran ekonomi Islam HTI, terbilang belum begitu banyak. Sehingga dalam pelacakan rujukan penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini, penulis kategorikan menjadi dua, yaitu *pertama* mengenai pemikiran HTI dalam bidang hukum Islam dan ekonomi Islam. *kedua* mengenai kajian fatwa. Diantara beberapa penelitian sebelumnya yaitu :

Pemikiran Keuangan Publik Hizbut Tahrir Indonesia.²³ Dalam disertasi ini, peneliti mengungkap gagasan pemikiran HTI tentang keuangan publik. Pemikiran HTI tentang keuangan publik tidak bisa dilepaskan dari klasifikasi ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi (murni) dan sistem ekonomi. Bagi HTI prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem ekonomi Islam terdiri dari tiga hal : 1. *Menyangkut* kepemilikan (*al-milkiyyah*) 2. Pengelolaan kepemilikan harta (*taṣarruf fī al-milkiyyah*) 3. Pendistribusian kekayaan (*tauzi' as-sarwah baina an-nas*). Konsekuensi definisi ini adalah adanya

²³ Nafis Irkhami, *Pemikiran Keuangan Publik Hizbut Tahrir Indonesia*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.

intervensi negara dalam perekonomian terutama menyangkut distribusi. Menurut HTI semua kepemilikan umum harus dikelola oleh negara bukan oleh swasta maupun individu. Selain melalui kebijakan publik, HTI juga berpendapat bahwa negara dapat menggunakan pola distribusi non ekonomi untuk mendistribusikan kekayaan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki akses ekonomi dengan baik.

Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir).²⁴ Tulisan ini mengkritisi pemikiran Hizbut Tahrir mengenai standar upah yang semestinya bagi para pekerja. Bagi HTI upah bagi pekerja didasarkan pada nilai kemanfaatan yang dihasilkan dari apa yang dikerjakan oleh pekerja, bukan didasarkan pada standar minimal kebutuhan hidup pekerja sebagaimana yang menjadi dasar regulasi upah minimum di Indonesia. Karena menurut HTI, jika didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pekerja, akibatnya akan menzalimi para majikan. Adapun jika upah yang diperoleh oleh pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka negara yang semestinya menanggung biaya hidupnya.

Menurut Ahmad Syakur aturan mengenai standar upah pekerja dalam Islam tidaklah seperti yang dikemukakan oleh Hizbut Tahrir. Ada banyak hadits dan pendapat ulama yang menjelaskan bahwa standar upah kerja itu bukan saja didasarkan pada nilai kerja yang dilakukan, namun juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan hidup pekerja. Bahkan secara tegas nabi, para sahabat dan pengikutnya menjadikan kebutuhan hidup pekerja sebagai komponen dalam penentuan upah bagi mereka khususnya pekerja yang bekerja di pemerintahan.

²⁴ Ahmad Syakur, "Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)", *Jurnal Universum*, vol.9, no. 1, Januari 2015.

Pendapat yang dipilih oleh penulis yaitu yang tidak menzalimi pekerja dengan standar minimum kebutuhan hidup mereka, dan tidak menzalimi majikan dengan standar maksimum kebutuhan hidup pekerja. Selanjutnya bagi Ahmad Syakur kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan bagi semua masyarakat khususnya pekerja yang tidak mencukupi gajinya seperti yang digagas oleh hizbut tahrir tidaklah tepat, karena Islam mewajibkan bekerja dan dan memenuhi kehidupan diri sendiri. Adapun kewajiban negara hanya pada kalangan dhuafa’.

Epistemologi Hukum Islam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) di balik gagasan anti kesetaraan gender.²⁵ Artikel ini mengurai apa yang menjadi landasan pemikiran MHTI dalam menolak gerakan kesetaraan gender yang santer disuarakan. Dalam analisisnya, penulis menemukan bahwa menurut muslimah HTI isu kesetaraan gender merupakan impor pemikiran dari barat yang bertentangan dengan syari’ah, dimana dalam al-Qur’an laki-laki diposisikan sebagai kepala rumah tangga sementara perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Pikiran penolakan gerakan kesetaraan gender ini tidak lepas dari pandangan mereka terhadap syariat, penafsiran terhadap syariat Islam tidak seharusnya mengutamakan penyesuaian nas-nas al-Qur’an dengan perkembangan ruang dan waktu. Menurutny masyarakatlah yang diubah sesuai dengan syariat, bukan sebaliknya. Pandangan seperti ini karena epistemologi mereka dalam memahami nas yang skriptualis tekstualis, dengan mengabaikan situasi sosial dan sejarah.

²⁵ Isnatin Ulfah, “Epistemologi Hukum Islam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) di Balik Gagasan Anti Kesetaraan Gender”, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10 /no.2, tahun 2013.

Pandangan Aktifis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Malang tentang Metode Ijtihad HTI dalam bidang politik dan Ibadah.²⁶ Selama ini para aktifis HTI memiliki pandangan yang sama mengenai pemikiran politik Islam, sementara dalam praktik ibadah ritual kerap kali berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini yang mendorong Fadh Ahmad melakukan penelitian terhadap metode ijtihad mereka. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dalam menghimpun datanya, peneliti menjadikan para aktifis HTI sebagai sumber utama.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa keseragaman ijtihad dalam bidang politik diawali dengan *fahmul waqi'* dan *fahmun nas*. Setelah itu menggunakan metode ijtihad manhaji. Kalau persoalan lama, cukup mengambil rujukan dari kitab-kitab HT, tidak merujuk langsung ke teks kitabnya namun merujuk pada nashnya. Sementara dalam bidang ritual ibadah, sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing individu untuk mengamalkan sesuai dengan yang mereka anggap benar, namun para pimpinannya lebih menekankan agar setiap anggota menggunakan pendapat yang lebih kuat (*rajih*), walaupun tidak mampu melakukan tarjih, maka tidak dipermasalahkan untuk bertaqlid kepada mazhab tertentu.

Revitalisasi *maqashid syariah* dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Studi kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI antara tahun 2000-2006)²⁷. Penelitian ini mengkaji seberapa sering Fatwa DSN-MUI mencantumkan kaidah-

²⁶ Fadh Ahmad Arifan, "Pandangan Aktifis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Malang tentang Metode Ijtihad HTI dalam bidang politik dan Ibadah", *Jurnal Justicie Jurnal Hukum dan Syariah*, volume 2, nomer 2, Desember 2011.

²⁷ M. Atho Mudzhar, "Revitalisasi *maqashid syariah* dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Studi kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI antara tahun 2000-2006)", *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 4 no. 1 Januari-juni, Tahun 2014.

kaidah fikih yang menjadi bagian dari elemen argumen masalahat tersebut. Dalam rentang waktu enam tahun antara 2000-2006, fatwa DSN-MUI mengutip kaidah fikih sebanyak 134 kali artinya dari setiap fatwa rata-rata menyebutkan 2,5 kaidah fikih. Namun masalah yang dijumpai adalah salah satu dari 2,5 kaidah tersebut ada yang monoton yaitu kaidah asal menganggap “asal suatu perbuatan muamalat adalah boleh”. Dalam pandangan Atho penggunaan kaidah umum ini seringkali tidak disertai dengan kaidah yang lebih khusus lagi, sehingga mengesankan fatwa DSN-MUI cenderung permisif atau liberal dan kurang jitu sudut argumennya, meskipun masih cukup absah.

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah (Perspektif Hukum Perbankan).²⁸ Artikel ini mengkaji tentang sejauh mana peranan fatwa DSN-MUI dalam perkembangan perbankan syariah. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, artinya bagaimana penerimaan fatwa DSN-MUI tersebut ditanggapi oleh pelaku perbankan, dan bagaimana fatwa itu ditinjau dalam konteks hukum perbankan. Dalam penelitiannya diperoleh jawaban bahwa fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut, namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kewajiban bagi regulator (Bank Indonesia) agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI diserap dan ditransformasikan sebagai prinsip-prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan)”, *Jurnal Recht Vinding*, volume 1, no. 2 Agustus Tahun 2012.

Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah.²⁹ Fatwa produk keuangan syariah di Indonesia yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki dinamika sebagai sebuah respon terhadap persoalan keuangan syariah khususnya. Dalam penelitian ini dikaji tiga hal, 1. Bagaimana dinamika dalam penyusunan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan melalui standar operasional penetapan fatwa oleh DSN-MUI sendiri mulai dari prosedur pengajuan persoalan oleh pihak *mustafti* baik dari kalangan industri, regulator, atau Lembaga keuangan syariah. Sampai kemudian dinamika yang terjadi dalam pembahasan fatwa yang merujuk pendapat para ahli hukum islam (*fuqaha*) yang beragam. 2. Bagaimana dinamika fatwa itu memiliki keterkaitan dengan lembaga fatwa lainnya, yang dianggap oleh mereka sendiri mempunyai otoritas untuk menetapkan fatwa. Sebagaimana fatwa no. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Fatwa ini ditanggapi oleh Dewan Hisbah Persis. Dalam kaitanya dengan ini penulis menyebutnya sebagai dinamika horizontal antar lembaga fatwa. 3. Penelitian ini membahas keterkaitan fatwa secara vertikal, yaitu bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tersebut menjadi peraturan yang dipositivisasi oleh otoritas yang berwenang yaitu Bank Indonesia.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ditemukan penelitian yang membahas pemikiran hukum bisnis Hizbut Tahri Indonesia khususnya mengenai Perseroan Terbatas.

F. Kerangka Teoretik

²⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 13. no. 1 Juni 2013.

Kerjasama dalam rangka mendirikan atau mengadakan suatu bentuk usaha bisnis telah berlangsung lama dalam sejarah peradaban manusia, bahkan jauh sebelum datangnya Islam, bentuk kerjasama ini telah ada. Kerjasama ini berawal dari adanya tuntutan kebutuhan manusia untuk mengelola sebidang tanahnya yang bukan saja diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi namun lebih dari itu untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara memperdagangkan hasil kebun mereka. Namun di satu sisi mereka memiliki keterbatasan fisik ataupun keterampilan. Singkatnya maka ditemukanlah persekutuan dengan orang lain sebagai instrumen untuk mempertemukan antara modal dan keterampilan.³⁰ Bahkan Mahmud Saqaf mencatat tata aturan mengenai suatu sistem persekutuan bisnis telah diatur sejak masa kerajaan Babilonia dalam Undang-undang Hamurabi pada tahun 100-107 SM.³¹

Tatkala Islam datang, praktik berkongsi atau dikenal dengan *syirkah* tersebut terus berlangsung. Meskipun demikian praktik yang ada diberikan nilai-nilai moral etis untuk dapat bersikap amanah satu sama lain. Ini menggambarkan bahwa suatu bentuk kegiatan muamalat tidak anti terhadap improvisasi, inovasi, dan adopsi, sepanjang tidak bertolak belakang dengan prinsip umum Islam. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah hukum (*legal maxim*) :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³²

³⁰ Muhammad bin Ibrahim Musa, *Syirkah al-Asykhhas Baina asy-sari'ah Wa al-Qanun*, (Riyad : Jami'ah Ibn. Su'ud al-Islamiyah, 1401 H), hlm. 17.

³¹ Mahmud as-Saqaf, *Falsafat Wa Tarikh an-Nazmi al-Ijtima'iyah Wa al-Qanuniyah*, (Kairo : Dar-al-Fikr,t.t), hlm. 117.

³² Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazâir*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983), hlm. 60.

Pada prinsipnya dalam perbuatan muamalat itu boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Pada era sekarang dikenal bentuk persekutuan baru yaitu, Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap*). Istilah ini terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.³³ Dasar pemikiran bahwa PT itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 UUPT, yakni :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”.

Hizbut Tahrir Indonesia memandang bahwa praktik perseroan terbatas sebagaimana yang tergambarkan di atas tidak sejalan dengan ketentuan *syirkah* dalam Islam, karena sejatinya Perseroan Terbatas yang melakukan aktifitas bisnis didasarkan atas perkumpulan modal-modal beberapa pihak.

³³ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1982), II : 85.

Pada prinsipnya para fuqaha klasik hanya mengenal dua macam *syirkah* yaitu *syirkah amlâk* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqûd* (terjadi karena akad). Adapun *syirkah amlâk* terbagi menjadi dua yaitu *ikhtiyâriyah* dan *ijbâriyah*. *Syirkah ikhtiyâriyah* terjadi karena kehendak dua orang atau lebih untuk bersekutu, misalnya ada dua orang yang diberikan hibah barang tertentu dan kedua orang tersebut sepakat untuk bersama-sama memiliki barang yang dihibahkan tersebut. Sebaliknya *ijbâriyah* yaitu kedua orang tidak dapat mengelak untuk bersekutu misalnya dalam pewarisan, dimana kepemilikan harta warisan secara bersama-sama bukan karena kehendak mereka, namun karena ketentuan syara' setelah meninggalnya orang yang diwarisi.³⁴

Sedangkan *syirkah 'uqûd* itu sendiri adalah persekutuan yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih untuk bersekutu modal, kerja atau keahlian dan keuntungan yang dihasilkan dari perkongsian tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Para ulama berbeda dalam membagi jenis atau macam-macamnya. Jumhur ulama membaginya menjadi empat yang terdiri dari, *syirkah 'inan*, *syirkah mufâwadah*, *syirkah wujûh* dan *syirkah abdân*, sedangkan Hanabilah membaginya menjadi lima karena memasukkan *syirkah muḍârabah*.³⁵

Berikut akan diuraikan penjelasan masing-masing *syirkah* tersebut :

1. *Syirkah 'inan*, yaitu, suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi antara mereka.³⁶

³⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo : Al-Fath Li al-i'lam al-Arabiyy, t.t), III : 202.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 345-346.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, cet. ke-2, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1985), IV : 796.

2. *Syirkah mufâwadah*, yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tašarruf* dan tanggungan utangnya, masing-masing menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.³⁷
3. *Syirkah wujûh*, yaitu *syirkah* atau kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang pada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.³⁸
4. *Syirkah abdân*, yaitu kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk melakukan suatu bentuk kerja (jasa) dengan ketentuan upah kerja mereka dibagi sesuai dengan kesepakatan.³⁹

Kajian yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia mengenai Perseroan Terbatas ini tak lepas dari proses berfikir atau analisa secara sistematis dengan menggunakan metodologi. Metodologi yang beragam inilah yang kerap kali mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat dalam memberikan pandangan hukum. Karenanya masalah ini tak lepas dari teori *Istinbât al-ahkam*.

Istinbât hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksud

³⁷ *Ibid.*, hlm. 798.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 801.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 803.

metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.⁴⁰

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbâṭ* hukum (metodelogi penggalian hukum), dinamakan ushul fikih. Ushul fikihlah satu-satunya bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syariat Islam dari sumber aslinya yakni al-Qur'an dan Hadis.⁴¹ Melalui kajian ushul fikih terdapat cara memahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Untuk memahami syariat Islam yang dibawa Rasulullah saw, ulama *Uṣuliyyin* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqâṣid asy-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).⁴²

Untuk memahami teks-teks ini secara tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan *istinbâṭ* hukum. Muhammad Salam Madkur membagi metode ijtihad (*istinbâṭ*) menjadi tiga, yaitu metode bayani, metode qiyasi dan metode istislahi.⁴³

Metode *bayani* adalah cara *istinbâṭ* (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah bahasa (*lugawiyyah*) atau makna lafaz. Metode ini menerangkan cara pemahaman suatu nash, baik nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, dari berbagai aspek yang mencakup : Makna lafadz yang sesuai dengan bentuknya, makna lafaz yang sesuai dengan pemakaiannya, Analisis lafaz

⁴⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 1.

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. xi-xiii.

⁴³ Muhammad Salam Madkûr, *al-Ijtihad fî at-Tasyri' al-Islami*, (ttp. : Dar an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1983), hlm. 42-43.

yang sesuai dengan kekuatannya dalam menunjukkan makna dan analisis *dalâlah* suatu lafaz atas makna.⁴⁴

Metode *qiyas* menurut ahli ushul al-fikih adalah menyamakan suatu kasus hukum yang tidak ada ketetapan hukum *syara* 'nya dalam teks dengan suatu kasus hukum yang telah ada teks hukumnya karena kesamaan *'illat* hukum keduanya.⁴⁵ Terakhir metode *istişlâhi* adalah cara atau kaidah dalam menetapkan status hukum suatu masalah dengan bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalili khusus mengenai masalah tersebut, dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai *maqâsid asy-syari'ah* (tujuan pokok syariah Islam) yang mencakup tiga kategori kepentingan, yaitu primer (*darûriyyat*), skunder (*hajiyyat*) dan pelengkap (*tahsiniyyat*).⁴⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat bantu utama dalam setiap penulisan ilmiah. Oleh sebab itu, untuk memahami permasalahan serta menyusun karya ilmiah diperlukan suatu metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Karena kajian mengenai pandangan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai Perseroan Terbatas tertuang dalam literatur-literatur tertulis, sehingga dalam menelaah pemikirannya diperlukan penelaahan dan pengkajian berbagai literatur yang terdokumentasikan dalam bentuk buku dan artikel yang ditulis oleh tokoh mereka. Dalam penelitian kepustakaan ini, kitab *an-nizâm al-iqtisâdi fî al-Islâm*,

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 30.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al-Fiki, 1986) I : 603.

⁴⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 44.

menjadi rujukan utama dalam mengurai pandangannya mengenai Perseroan Terbatas. Harus diakui karya tersebut merupakan tulisan pribadi an-Nabhani.

Namun demikian materi atau isi dari keseluruhan buku tersebut juga menjadi pandangan Hizbut Tahrir (Indonesia), karena dalam organisasi mereka, dikenal istilah *tabanni*, yaitu mengadopsi suatu pemikiran keagamaan yang menjadi pandangan organisasi. Karenanya, buku tersebut khususnya mengenai perseroan terbatas, dijelaskan lebih lanjut dalam oleh para pengikutnya melalui tulisan-tulisan mereka. Sehingga dalam penelitian kepustakaan ini, pandangan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia yang menjadi penjelas atas pandangan an-Nabhani, juga penulis telaah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat kritis-analitik, yaitu penelitian yang mencoba untuk memberikan penilaian terhadap objek kajian yang diteliti. Dalam hal ini, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia mengenai ketidaksahan Perseroan Terbatas penulis kritisi atau nilai sejauh mana keabsahan argumentasi tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini berupa normatif, gagasan atau pandangan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai Perseroan Terbatas dipaparkan alasan-alasannya tidak membenarkan praktik perseroan tersebut, selanjutnya pandangan mereka dikaji. Selain itu, pendekatan yang penulis pergunakan juga dengan pendekatan filosofis-ushul fikih, dimana dalam penelitian ini digali bagaimana metode ijthiad HTI dalam menyampaikan pandangan mereka mengenai Perseroan Terbatas.

Yang meliputi cara pemahaman konteks, dan mengaitkannya dengan dalil-dalil syara' atau metode istinbath mereka.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai rujukan pokok dalam menggali data-datanya, karenanya dalam mengumpulkan data ini dilakukan dengan tehnik dokumentasi. Dalam menggali pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia tentang Perseroan Terbatas penulis menelusuri berbagai literatur antara lain baik yang bersifat primer ataupun skunder. Diantara sumber-sumber primer yang penulis rujuk yaitu *an-nizâm al-iqtisâdi fi al-Islâm*, yang mana dalam kitab tersebut dibicarakan mengenai perseroan saham/perseroan terbatas. Kitab ini merupakan karya pendiri Hizbut Tahrir yaitu Taqiyuddin an-Nabhani. Selanjutnya karya-karya tokoh HT di Indonesia seperti Bisnis dan Muamalah Kontemporer, merupakan karya Hafidz Abdurrahman (tokoh Hizbut Tahrir Indonesia). Sedangkan sumber sekunder terdiri dari website resmi HTI, Majalah, buletin dan buku-buku mengenai fatwa lainnya.

5. Analisis Data

Dari data yang telah dihimpun, selanjutnya dilakukan analisis secara induktif yang pada umumnya disebut generalisasi. Analisis induktif ini, yaitu metode yang digunakan dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus untuk

selanjutnya ditarik suatu kesimpulan umum.⁴⁷ Dalam penelitian ini data mengenai pandangan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai Perseroan Terbatas dihimpun dan selanjutnya akan ditarik satu kesimpulan secara umum bagaimana metode istinbat hukunya. Dan bagaimana seharusnya Perseroan dalam Islam menurut Hizbut Tahrir Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membentuk sebuah karya ilmiah yang baik, maka diperlukan penyajian bahasan yang sistematis. Dalam penelitian ini penulis akan membaginya menjadi lima bab. *Bab pertama*, berisi pendahuluan yang akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, atau metodologi penelitian yang dipergunakan.

Bab kedua, uraian lebih lanjut mengenai landasan teori yang penulis gunakan, yaitu mengenai Perseroan Terbatas, *Syirkah* dalam Islam,

Bab ketiga, dalam bab ini penulis memaparkan mengenai subjek yang akan diteliti yang meliputi, sejarah hizbut tahrir indonesia, pola gerakan dan pemikiran hizbut tahrir indonesia, serta memaparkan dan menguraikan pandangan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai Perseroan Terbatas.

Bab keempat, Analisis data yang berkaitan dengan pandangan Hizbut Tahrir Indonesia tentang Perseroan Terbatas, serta metodologi pengambilan hukum HTI dalam mengkaji praktik dari Perseroan Terbatas.

Bab kelima, bab penutup, berisi kesimpulan berupa jawaban dari masalah penelitian ini. Selanjutnya saran terhadap temuan-temuan penelitian.

⁴⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 296.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perseroan modern atau perseroan terbatas dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia tidak sah secara garis besar karena disebabkan tiga hal,
 - a. tidak adanya unsur badan, namun yang ada hanyalah unsur modal.
 - b. akibat tidak adanya unsur badan ini nampak dari suatu perseroan yang berbentuk badan hukum yang merupakan kumpulan modal semata.
 - c. transaksi yang dilakukan oleh para pendiri perseroan hanya timbul dari kehendak sepihak. Menurut Hizbu Tahrir Indonesia, konsekuensi dari ketiga hal ini mengakibatkan *tasarruf* yang dilakukan oleh PT batal demi hukum, karena pada dasarnya persekutuan itu tidak mencerminkan unsur-unsur dan persyaratan yang semestinya ada dalam suatu bentuk *syirkah*.

Dari analisis penulis, pandangan Hizbut Tahrir Indonesia tersebut tidak tepat. Karena argumentasi-argumentasi yang dikemukakan sebenarnya tidak sesuai dengan fakta perseroan terbatas tersebut. Dalam arti kata Hizbut Tahrir Indonesia terlalu kaku dalam memahami bentuk ijab dan qabul, unsur badan, dan badan hukum itu sendiri.

Pandangan Hizbut Tahrir mengenai perseroan tersebut, tidak lepas dari pandangannya terhadap ideologi-ideologi di luar Islam. Sejak awal Hizbut Tahrir telah sinis terhadap sistem Perseroan Terbatas, karena perseroan tersebut

sejatinya lahir dari konsep barat yaitu sistem kapitalis, sementara Hizbut Tahrir menyatakan bahwa sistem Kapitalis tersebut adalah suatu bentuk kesesatan berfikir.

2. Hizbut Tahrir Indonesia memiliki seperangkat konsep berfikir dalam menentukan hukum sesuatu, hal itu dapat dilihat dari karya an-Nabhani dalam *asy-Syakhsyah al-Islamiyah* yang memaparkan teorisasi ushul fiqh. Yang sesungguhnya itu tak lepas dari cita-cita HTI untuk mendirikan khilafah, dimana ushul fiqh tersebut menjadi konsep berfikir khalifah dalam membuat kebijakan dan menetapkan hukum-hukum syara'.

Hizbut Tahrir Indonesia, hanya mengakui empat dalil saja yang digunakan dalam berhujjah, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Sahabat dan Qiyas. Sedangkan dalil-dalil yang lainnya tidak dipergunakan. Meskipun demikian, dalil semisal maslahat al-mursalah, istihsan, istishab dan lain-lainnya, dianggap sebagai *syubhat ad-dalil*, dan jika berhujjah dengannya masih tetap dipandang sebagai pemikiran *syar'i*. Hanya saja Hizbut Tahrir tidak mempergunakannya.

Dalam kaitannya dengan perseroan terbatas, Hizbut Tahrir tidak konsisten untuk mempergunakan metodologi *istinbath* tersebut. Karena dalam menghukumi perseroan, ia melakukan *ilhaq*, yaitu mencocokkan antara konsepsi hukum dalam fikih dengan persoalan yang muncul kemudian yang tidak dibahas dalam fuqaha klasik. Hal ini nampak pada pencocokan antara *syirkah* dalam konsepsi fikih klasik dengan perseroan itu sendiri. Selain itu, pembagian jenis-

jenis *syirkah* yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir sama persis dengan pendapat para ulama fikih klasik, bahkan ia memasukkan semua jenis *syirkah* tersebut terkategori boleh, tanpa terlebih dahulu untuk melakukan tarjih antar pendapat para imam mazhab.

B. Saran-saran

1. Berfikir terlalu fikih-formalistik dan kaku justru akan menyulitkan Hizbut Tahrir Indonesia dalam melakukan interaksi dengan pihak di luarnya secara umum, terlebih dalam urusan-urusan bisnis. Karena hubungan bisnis yang terjadi di era sekarang bukan hanya terbatas pada hubungan antar individu dan lokalitas, namun hubungan bisnis tersebut sudah menggelobal. Karenanya dalam memberikan pandangan hukum-hukum syariah terhadap perkembangan bisnis tersebut tidak cukup hanya dengan konsepsi fikih klasik, namun seharusnya menggunakan kaidah-kaidah umum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau prinsip-prinsip maslahat yang telah ditetapkan oleh para ulama.
2. Konsepsi persekutuan bisnis yang sesuai dengan syara' seharusnya tidak terhenti pada tataran teoritis semata tanpa kemudian berusaha mengintegrasikannya dengan konsep-konsep modern. Karena perseroan terbatas sendiri sesungguhnya akan bisa meminimalisir kerugian para pendiri atau investor, dan manajemen perusahaan yang lebih baik. Sehingga jika dalam pandangan Hizbut Tahri Indonesia, bahwa Perseroan yang ada saat ini tidak sesuai dengan syara' maka seharusnya dapat membuat suatu konsepsi baru tentang bagaimana Perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : CV. J-ART, 2004.

Hadis

Sulaiman, Abu Dawud bin al-Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, , Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Suyuti, Jalaluddin, *Sunan an-Nasa'i bi asy-Syarh as-Suyuti*, Beirut : Dar al-Fikr, 2009.

Fikih/Ushul Fikih

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993

Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor : Al-Azhar Fresh Zone, 2014.

Abdurrahman, Hafiz. *Pemikiran Ushul Fiqh Hizbut Tahrir*. <https://hizbut-tahrir.or.id>. Artikel diterbitkan pada tanggal 29 April 2008.

Abidin, Ibnu. *Rad al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abşar*. Mesir : al-Maimunah. 1298 H.

Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia*. Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta Press. 2001.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Elsa, 2008.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah ; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat cet. Ke-2*,. Jakarta : Raja Grafindo. 2010..

Arifan, Fadh Ahmad. "Pandangan Aktivis HTI di Malang tentang Metode Ijtihad HTI dalam Bidang Politik dan Ibadah", *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 2 Nomor 2 Tahun

Gayo , Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Mendorong Perkembangan Perbankan Syariah", *Jurnal Rechtvinding*, Vo. 1 No. 2, 2012.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1996.

- Khalaf, Abdul Wahab *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib). Semarang : Dina Utama, 1994.
- Madkur, Muhammad Salâm, *al-Ijtihâd fî at-Tasyri’ al-Islami*, ttp. : Mu’assasah asy-Syabâb, t.t.
- Mas’adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, “Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syari’ah” *Jurnal Ijtihad*, Vol. 13. no. 1 Juni 2013.
- Mudzhar , M. Atho, “Revitalisasi maqâsid syari’ah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Studi kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI antara tahun 2000-2006)” *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 4 no. 1 Januari-juni, Tahun 2014.
- Musa, Muhammad bin Ibrahim. *Syirkât al-Asykhâs fî al-Syari’ah wa al-Qanun*. Riyad : Jami’ah al-Imam as-Su’ud, 1396 H.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nizâm al-Iqtisâdi fî al- Islâm*, Beirut : Dar al-Ummah, 2004.
- , *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*. Beirut : Dar al-Ummah. 2005.
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : UI Press, 2011.
- Al-Qaradâwi, Yusuf. *al-Qawâid al-Hakimah li fiqh al-Mu’âmalat (terj.7 Kaidah Utama Fikih Muamalat)*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2010.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf* . Bandung : Alumni. 1986.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2000).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* cet. Ke-6. Beirut : Dar al-Ma’arif. 1982.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo : Al-Fath li’ilam al-Arabi, t.t.
- Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris *Al-Um Tahqiq wa Tarjih Rifa’at Fauzi*, ttp. : Dar-al-Wafa’. 2001.
- Ulfah, Isnatin, “Epistemologi Hukum Islam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) di Balik Gagasan Anti Kesenjangan Gender”, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10 /no.2, tahun 2013.

Wahyudi, Yudian. *Hasbi's Theory of Ijtihad :in The context of Indonesian Fiqh*. Yogyakarta : Nawasea Press, 2007.

Zahra, Muhammad Abu, *al- Milkiyyah wa an-Nazariyat al- 'Aqdu*. Damaskus : Dar al-Fikr. 1976.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Fiqh al-Islamiy Fi saubih al-Jadid : Al-Madkhal Ila Nazriyatul Itizam al-Amah*, Damaskus : Dar al-Qalam. 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islamiy*. Damaskus : Dar al-Fiki, 1986.

————— *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, cet. ke-2. Beirut : Dar al-Fikr. 1985.

Hukum Perdata

Fuady, Munir . *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2003.

————— *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung : CV. Utomo, 2005.

Khairandy, Ridwan. *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta : FH UIL. 2013.

Maskun, “Problematisa Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, No. 49. Jakarta : al-Hikmah, 2000.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Ourwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II*. Jakarta : Djambatan, 1998.

Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Bandung : Citra Aditya. 2001.

Sardjono, Agus, dkk. *Pengantar Hukum Dagang*, cet. ke-2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Hukum Dagang Di Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2012.

Widijowati, Dijan. *Hukum Dagang*. Yogyakarta : CV. Andi Offset. 2012.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/1999.

Lain-lain

Al-Hilali, Salim bin Ied. *Al-Jama'ah al-Islamiyah fi dhaui'il al-Kitab Wa as-Sunnah bi Fahmi Salaf al-Ummah*, terj. Abu Ihsan. Solo : Pustaka Imam Bukhari, 2004.

Anis, Ibrahim dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo : Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1972.

<http://mui.or.id/tentang-mui/pengurus-mui/periode-berjalan/pengurus-hasil-munas-2015.html>

Irkhami, Nafis. *Pemikiran Keuangan Publik Hizbut Tahrir Indonesia*, Tidak diterbitkan Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2007.

Muhammad bin Makram ibn. Manzhur al-Fariqi al-Misri, *Lisan al-'Arab*. Beirut : Dar Sadr, 1997.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizâm al-Islam*, cet. Ke-4,. Beirut : Hizbut Tahrir, 2001.

_____. *At-Ta'fikir*, ttp. : Hizb al-Tahrir. 1953.

_____. *At-Takattu al-Hizbi*, cet. Ke-4. Hizbut Tahrir. 2001.

_____. *Manhaj Hizbut Tahrir Fi at-Tagyir*. Beirut : Hizb a-Tahrir. 2009.

_____. *Mafâhim Hizbut Tahrir*, cet. ke-6, .Al-Quds : Hizbut Tahrir, 2001.

_____. *Muqaddimah ad-Dustur*. Beirut : Dar al-Ummah, 2005.

Nindyo Pramono, “Kedudukan Kekayaan Negara Dipisahkan Menurut UU. No. 19 Tahun 2002 tentang BUMN”, dalam Sri Rejeki Hartono, dkk., *PERMASALAHAN Seputar Hukum Bisnis, Persembahan Kepada Sang Maha Guru* (Yogyakarta : Tanpa Penerbit, 2006), hlm. 142.

Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta : Erlangga, 2005).

- Rodhi, Muhammad Muhsin. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Khilafah*, Bogor : Al Azhar Fresh Zone. 2012.
- Syakur, Ahmad, “Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)”, *Jurnal Universum*, vol.9, no. 1, Januari 2015.
- Wafa’, Romli Abu, *Membongkar Pemikiran ASWAJA Topeng 2 : Kesalahan Logika Kaum Liberal*, Bogor : Al-Azhar Freshzone. 2013.
- Waluyo, Sapto, *Kebangkitan Politik Dakwah*. Bandung : Harakatuna Publishing, 2005.
- Wamy, *Al-Mausu’ah al-Muyassarah Fi al-Adyan Wa al-Mazâhib al-Mu’âsirah*, terj. A. Najiyullah. Jakarta : al-I’tisam Cahaya Umat, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : PT Mahmud Yunus Wadzuryah. 1990.
- Zainuddin, *Startegi Pengambilalihan Kekuasaan dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesua. 2004-2009. disertasi tidak diterbitkan*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI TOKOH

1. Yusuf al-Qaraḍāwī

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Şaft Turâb di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Ṭaṇṭa dan Ma'had šanawi, Qaraḍāwī terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Uşuluddin. Dia lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qaraḍāwī pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qaraḍāwī terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Qaraḍāwī memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Dâr al-Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qaraḍāwī terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dâr al-Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qaraḍāwī merupakan

seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaraḍāwī, telah menghambat kemajuan umat Islam.

2. Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Prof.Dr.Wahbah az-Zuhaili adalah cerdik cendikia yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Aṭīah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar al-Qur`an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syari`ah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah *takhaṣṣus* pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat *summa cum laude* dengan disertasi berjudul "*Aṣḥar al-Harbi fī al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah Baina al-Mazāhib aṣ-Ṣamāniah Wa al-Qanun Ad-Dauli al-'Am*" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqh Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional). Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang. Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "*Inna sirra an-najah fī al-hayat, ihsan aṣ-ṣilah billahi `azza wa jalla*" (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Alloh`Azzawajalla).

Karir Akademis

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah az-Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada

Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

Karya Ilmiah

Syaikh Wahbah az-Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Diantaranya, *Mausu'at al-Fiqh al-Islami Wal-Qadâya al-Mu'aşirah*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, *at-Tafsir al-Munir*, *al-Fiqh al-Islami fî uslubihî al-Jadid*, *Nazaariyatu ad-durûrât asy-Syari'ah*, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, *az-zarai'ah fî Siyasah asy-Syari'ah*, *al-'Alaqat ad-Dualiah fî al-Islam*, *Juhud Taqîn al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar*, *al-Fiqh al-Hanafî al-Muyassar*, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar*.

Dr. Badi' As Sayyid Al Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "Wahbah Az Zuhaili al -`Alim, Al Faqih, Al Mufasssir" menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah selain jurnal, beliau juga memiliki 500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah. Demikian produktifnya Syaikh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi' mengumpamakannya seperti Imam as Suyuti di masa lampau.

TERJEMAH TEKS ARAB

BAB	Hlm	Fn	TERJEMAH
I	17	30	Pada dasarnya dalam perbuatan muamalat itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
II	56	75	Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.
	56	76	Ia bersekutu dalam suatu persekutuan, artinya masing-masing dari keduanya memiliki bagian darinya.
	58		Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.
	58		Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.
	59	82	Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi saw, beliau bersabda : Allah swt berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama satu sama lain tidak mengkhianati mitranya, Jika ia mengkhianati mitranya, maka aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud)
	59	83	Dari as-Sa'ib al-Makhzumi berkata bahwa sesungguhnya ia dahulu adalah sekutu Nabi saw sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang ketika hari pembebasan kota makkah, Maka Nabi saw berkata : Selamat datang saudaraku dan serikatku. (H.R. Abu Dawud).
	61	91	Syirkah milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad syirkah.
	62	94	<i>Syirkah al-'uqud</i> adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya.
	63	98	<i>Syirkah 'inan</i> adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua belah pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka.
	64	99	Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya.
	65	101	<i>Syirkah al- mufâwadah</i> menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, <i>tasarruf</i> dan agamanya, dan

			masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.
	67	104	Apabila kalian melakukan <i>mufawadah</i> , maka perbaguslah <i>mufawadah</i> kalian.
	67	105	Syirkah wujud adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.
	68	107	<i>Syirkah abdan</i> adalah kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.
	69	108	Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ia berkata: "Saya, Ammar, dan Sa'ad bersekutu dalam hasil yang diperoleh pada Perang Badar. Maka Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa." (HR. an-Nasa'i).
III	80		Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran (3) : 104).
	107	40	Kerugian itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati.
	110	48	Dan diantara bentuk <i>muḍârabah</i> adalah persekutuan dua harta dan badan salah satu di antara keduanya. Dan sekiranya diantara kedua pihak tersebut terkumpul tiga ribu, satu pihak berkontribusi dua ribu dan pihak yang lain seribu. Selanjutnya pemilik modal dua ribu mengizinkan kepada pemilik modal seribu untuk mengelola usaha mereka dengan keuntungan dibagi sama-sama seperdua. Yang demikian itu sah bentuk persekutuannya. Dan pengelola, yaitu pemilik modal seribu disebut sebagai <i>muḍârib</i> bagi pemilik modal dua ribu sekaligus mitranya. Demikian juga, bentuk <i>muḍârabah</i> adalah persekutuan dua modal dan satu badan. Kedua bentuk diatas termasuk dalam kategori <i>muḍârabah</i> .
	112	52	Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan kredibilitas di sini adalah kredibilitas finansial, bukan kedudukan dan kehormatan. Karena kredibilitas jika dikaitkan dengan perdagangan dan <i>syirkah</i> dan bentuk bisnis lainnya maka maksudnya adalah kredibilitas finansial. Karena, terkadang ada orang yang terpengaruh namun tidak memiliki kredibilitas

			finansial.
	114	56	Adapun yang disebutkan oleh sebagian <i>fuqaha</i> di antara jenis <i>syirkah al-mufâwadah</i> yang lain, yaitu persekutuan antara dua pihak lalu dipersyaratkan kesamaan dalam harta, <i>tasarruf</i> , dan agama keduanya. Lalu kedua belah pihak menyerahkan hak (kewenangan) kepada mitranya secara mutlak, maka tidak boleh secara mutlak, karena tidak ada dalil syar'i yang membolehkannya.
IV	132	1	Akad secara bahasa diartikan dengan menggabungkan antara dua ujung-ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “al-hillu” (melepaskan), juga diartikan meengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.
	132	2	Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai.
	132	3	Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain : Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya.
	134	4	Dan adapun dalam Perseroan Terbatas, para pendiri bersepakat terhadap klausul-klausul kontrak dan tidak langsung berserikat dalam bentuk perbuatan tatkala mereka menyepakati kontrak tersebut. Akan tetapi mereka hanya saling mendelegasikan dan menyepakati klausul kontrak saja. Kemudian mereka membuat akta pendirian, yaitu Anggaran Dasar, kemudian para pendiri tersebut menandatangani akta tersebut, Lalu dipandanglah bahwa tanda tangan mereka merupakan <i>qabul</i> . Dan seketika itu para pendiri dianggap pula sebagai <i>syarik</i> . Yaitu persekutuan terbentuk secara sempurna, tatkala telah ditandatangani atau batas pendaftaran telah berakhir. Maka, di sini jelas tidak ditemukan dua pihak yang melakukan akad secara bersama-sama, dan tidak ditemukan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> , akan tetapi yang ada hanyalah satu pihak yang menyepakati klausul-klausul kontrak. Karenanya Perseroan Terbatas merupakan kesepakatan (kehendak) dari satu pihak yang menyepakati klausul kontrak.
	139	14	Orang mu'min itu nilai darahnya sama, yang paling rendah bisa berjalan membawa tanggungan mereka, dan yang paling

			jauh melindungi atas mereka. Mereka adalah satu tangan atas selain mereka. (H.R. Abu Dawud).
	140	15	Dan Perseroan Terbatas terbentuk dengan modal semata tanpa ada unsur badan dan pengelola yang memiliki hak <i>tasarruf</i> , Dan PT menjadikan modal memiliki hak <i>tasarruf</i> . Karena PT merupakan kumpulan modal-modal yang selanjutnya memiliki hak <i>tasarruf</i> . Oleh karena itu PT disebut sebagai badan hukum yang dengan sendirinya memiliki hak <i>tasarruf</i> , baik berupa jual beli, produksi, dan diperkarakan dan lain sebagainya. Sementara para persero tidak memiliki hak untuk mengelola. Yang berhak hanyalah badan hukum tersebut.
	147		Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya (Q.S. Al-Isra (17) : 36).
	147		Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. (Q.S. Yunus (10 : 36)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Arif Al-Kausari
Tempat/tgl. Lahir : Selong, 15 September 1990
Alamat Rumah : Kelayu Selatan, RT. 025, Selong, Lombok Timur
Nama Ayah : H. M. Hakki
Nama Ibu : Hj. Fauziah

B. Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 2 Kelayu, tahun lulus 2003
- b. MTS Nurul Haramain NW Narmada, tahun lulus 2006
- c. MA Hamzanwadi Pancor, tahun lulus 2009
- d. INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR, tahun lulus 2014

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Ma'had Darul Qur'an Wal Hadis (MDQH) NW

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf Pengajar Bahasa Arab SMP IT Ar-Risalah
2. POSBAKUM Pengadilan Agama Selong
3. Tutor Bahasa Arab Jogja Course Center (JCC)

D. Pengalaman Organisasi

1. KAMMI NTB
2. Komunitas Gerakan Indonesia Mengaji Cab. Yogyakarta
3. Lazis Al-Haramain Cab. Yogyakarta

No. HP. : 087843290851
email : arifkausari@gmail.com